

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan/perkembangan asumsi kebijakan umum APBD, baik penambahan program dan kegiatan serta pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2010.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959, Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 13);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 20);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, semula berjumlah Rp 994.672.091.095,42 bertambah sejumlah Rp 60.216.236.455,79 sehingga menjadi Rp 1.054.888.327.551,21 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp 932.610.070.182,04	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp 64.012.316.600,10	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 996.623.188.882,00

2. Belanja Daerah :

a. Semula	Rp 994.672.091.095,42	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp 60.216.236.455,79	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp 1.054.888.327.551,21

Surplus/(Defisit)

Rp. (58.265.138.669,21)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan :

1). Semula

Rp 133.966.850.000,00

2). Bertambah / (berkurang)

Rp (2.276.082.243,37)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp 131.690.767.756,63

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp 71.905.629.087,42

2) Bertambah / (berkurang)

Rp 1.520.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp 73.425.629.087,42

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan

Rp 58.265.138.669,21

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan

Rp 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

Rp 70.907.869.427,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp (11.917.102.319,84)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp 58.990.767.107,16

b. Dana perimbangan :

1) Semula

Rp 811.317.742.843,84

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp 51.426.000.419,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp 862.743.743.262,84

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah			
1) Semula	Rp 50.385.257.912,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 24.503.420.600,00		
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan		Rp 78.888.678.512,00	
d. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp 13.928.500.000,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 384.101.000,00		
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan		Rp 14.312.601.000,00	
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp 5.929.402.210,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 3.911.439.377,00		
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan		Rp 9.840.841.587,00	
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan			
1) Semula	Rp 5.632.677.017,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 1.906.570.323,00		
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp 7.539.247.340,00	
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp 45.417.290.200,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp (18.119.213.019,84)		
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan		Rp 27.298.077.180,16	

3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/ Bukan Pajak :

1) Semula	Rp 424.505.046.843,84	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 51.420.000.410,00	
Jumlah Dana bagi hasil Pajak/ Bukan Pajak setelah Perubahan		Rp 476.021.047.262,84

b. Dana Alokasi Umum :

1) Semula	Rp 371.879.096.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 0	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp 371.879.096.000,00

c. Dana Alokasi Khusus :

1) Semula	Rp 14.843.600.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 0	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp 14.843.600.000,00

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah dari Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp 8.876.047.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp (8.876.047.000,00)	
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp 0

Hibah dari Pemerintah Provinsi (Jamsoskes)

1) Semula	Rp 0	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 0	
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp 0

Dana darurat

1) Semula

Rp 0

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp 0

Jumlah Dana darurat setelah Perubahan

Rp 0

b. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula

Rp 37.945.063.312,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp 0

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan

Rp 37.945.063.312,00-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula

Rp 3.564.147.600,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp 16.503.420.600,00

Jumlah Dana Penyesuaian /Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru -
PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD setelah Perubahan

Rp 20.067.568.200,00

d. Dana Percepatan Pemb.Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)

1) Semula

Rp 0

2) Bertambah / (Berkurang

Rp 1.000.000.000,00

Jumlah Dana DPPIP setelah Perubahan

Rp 1.000.000.000,00

e. Dana Penguatan Infrastruktur & Prasarana Daerah (DPIPD)

1) Semula

Rp 0

2) Bertambah / (Berkurang

Rp 3.000.000.000,00

Jumlah Dana DPIPD setelah Perubahan

Rp 3.000.000.000,00

f. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF & PPD)

1) Semula	Rp 0	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 8.876.047.000,00	
Jumlah Dana DPDF & PPD setelah Perubahan		Rp 8.876.047.000,00

g. Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Selatan

1) Semula	Rp 0	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 4.000.000.000,00	
Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Prov. Sumsel setelah Perubahan		Rp 4.000.000.000,00

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp 475.694.543.078,42	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 35.124.896.936,79	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp 510.819.440.015,21

b. Belanja Belanja Langsung

1) Semula	Rp 518.977.548.017,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 25.091.339.519,00	
Jumlah Belanja Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp 544.068.887.536,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp 412.869.920.004,42	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 35.695.680.003,93	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan		Rp 448.565.618.468,35

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp 2.082.941.993,60	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 0	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan		Rp 2.082.941.993,60

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp 2.283.662.500,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 0	
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan		Rp 2.283.662.500,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp 9.319.898.960,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 0	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan		Rp 9.319.898.960,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp 14.360.033.248,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp (798.577.727,14)	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp 13.561.455.520,86

f. Belanja bagi hasil kepada Desa		
1) Semula	Rp 36.716.948,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 0	
Jumlah Belanja bagi hasil kepada Desa setelah Perubahan		Rp 36.716.948,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp 32.210.540.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 227.785.000,00	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp 32.438.325.000,00
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp 2.530.820.624,40	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 0	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp 2.530.820.624,40
b) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp 50.630.092.325,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp (1.575.268.788,-)	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan		Rp 49.054.823.537,-
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp 198.359.033.418,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 11.986.292.297,-	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp 210.345.325.715,-
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp 269.988.422.274,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 14.680.316.010,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp 284.668.738.284,00

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula

Rp 133.966.850.000,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp (2.276.082.243,37)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

Rp 131.690.767.756,63

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp 71.905.629.087,42

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp 1.520.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

Rp 73.425.629.087,42

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula

Rp 85.368.850.000,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp (2.276.082.243,37)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) setelah Perubahan

Rp 83.092.767.756,63

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula

Rp 0

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp 0

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan

Rp 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula

Rp 0

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp 0

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

Rp 0

d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp 48.598.000.000,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 0		
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp 48.598.000.000,00	
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp 0		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 0		
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp 0	
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp 0		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 0		
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp 0	
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp 0		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 0		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp 0	
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp 70.744.529.500,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 1.500.000.000,00		
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp 72.244.529.500,00	
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp 181.135.587,42		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 0		
Jumlah Pembayaran pokok utang pada ADB setelah Perubahan		Rp 181.135.587,42	

d. Pembayaran utang pada pihak ketiga		
1) Semula	Rp 979.964.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 20.000.000,00	
Jumlah Pembayaran utang pada pihak ketiga setelah Perubahan		Rp 999.964.000,00

Pasal 5

raian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
- 2 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
- 3 Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- 7 Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 8 Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9 Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

ati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai landasan rasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

ndangkan di Muara Enim
a tanggal 18 Oktober 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

IBRAHIM ZULKIFLI

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 18 Oktober 2010

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

EMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI A

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 13 TAHUN 2010

TANGGAL : 18 OKTOBER 2010

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

NO URUT	U R A I A N			JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN (RP)	SETRELAH PERUBAHAN (RP)	(RP)	(%)
1	2			3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH						
1	1		Pendapatan Asli Daerah	Rp. 70.907.869.427,00	58.990.767.107,16	(11.917.102.319,84)	(16,81)
1	1	1	Pajak Daerah	Rp. 13.928.500.000,00	14.312.601.000,00	384.101.000,00	2,76
1	1	2	Retribusi Daerah	Rp. 5.929.402.210,00	9.840.841.567,00	3.911.439.377,00	65,97
1	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 5.632.677.017,00	7.539.247.340,00	1.906.570.323,00	33,85
1	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 45.417.290.200,00	27.296.077.160,16	-18.119.213.019,84	(39,89)
1	2		Dana Perimbangan	Rp. 811.317.742.843,84	862.743.743.262,84	51.426.000.419,00	6,34
1	2	1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 424.595.046.843,84	476.021.047.262,84	51.426.000.419,00	12,11
1	2	2	Dana Alokasi Umum	Rp. 371.879.096.000,00	371.879.096.000,00	0,00	-
1	2	3	Dana Alokasi Khusus	Rp. 14.843.600.000,00	14.843.600.000,00	0,00	-
1	3		Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 50.385.257.912,00	74.888.678.512,00	24.503.420.600,00	48,63
1	3	1	Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp. 8.876.047.000,00	0	(8.876.047.000)	(100,00)
			- Hibah Bidang Air Bersih : Rp. 4.931.137.000,-				
			- Hibah Bidang Kesehatan : Rp. 3.944.910.000,-				
1	3	2	Dana Darurat	Rp. -	-	-	-
1	3	3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 37.945.063.312,00	37.945.063.312,00	-	-
1	3	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
			- Dana Tambahan Penghasilan bagi guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD	Rp. 3.564.147.000,00	20.067.558.200,00	16.503.420.600,00	463,04
		5	Dana Percepatan Pemb. Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)	Rp. -	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
		6	Dana Penguatan Infrastruktur & Prasarana Daerah (DPIPD)	Rp. -	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
		7	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF & PPD)	Rp. -	8.876.047.000,00	8.876.047.000,00	
		8	Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Selatan	Rp. -	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
			JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	Rp. 932.610.870.182,84	996.623.188.882,00	64.012.318.699,16	

NO URUT	URAIAN		JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	
			SEBELUM PERUBAHAN (RP)	SETRELAH PERUBAHAN (RP)	(RP)	(%)
		2	3	4	5	6
2		BELANJA DAERAH				
2	1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 475.694.543.078,42	510.819.440.015,21	35.124.896.936,79	7,38
2	1	1 Belanja Pegawai	Rp. 412.869.928.804,42	448.565.618.465,35	35.695.689.663,93	8,65
2	1	2 Belanja Bunga	Rp. 2.082.941.993,60	2.082.941.993,60	-	0,00
2	1	3 Belanja Subsidi	Rp. 2.283.662.500,00	2.283.662.500,00	-	0,00
2	1	4 Belanja Hibah	Rp. 9.319.898.960,00	9.319.898.960,00	-	0,00
2	1	5 Belanja Bantuan Sosial	Rp. 14.360.033.248,00	13.581.455.520,86	(798.577.727,14)	-5,56
2	1	6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 36.716.948,00	36.716.948,00	-	0,00
2	1	7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Ka/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 32.210.540.000,00	32.438.325.000,00	227.785.000,00	0,71
2	1	8 Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.530.820.624,40	2.530.820.624,40	-	0,00
2	2	Belanja Langsung	Rp. 518.977.548.017,00	544.068.887.536,00	25.091.339.519,00	4,83
2	2	1 Belanja Pegawai	Rp. 50.630.092.325,00	49.054.623.537,00	(1.575.268.788,00)	(3,11)
2	2	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp. 198.359.033.418,00	210.345.325.715,00	11.986.292.297,00	6,04
2	2	3 Belanja Modal	Rp. 269.988.422.274,00	284.668.738.284,00	14.680.316.010,00	5,44
		JUMLAH BELANJA DAERAH	Rp. 994.672.091.095,42	1.054.888.327.551,21	60.216.236.455,79	6,05
		SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (62.061.220.912,58)	(56.265.138.669,21)	3.796.082.243,37	(6,12)
3		PEMBIAYAAN DAERAH				
3	1	Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	Rp. 85.368.650.000,00	83.092.787.756,63	(2.276.082.243,37)	(2,67)
3	1	2 Pencarian Dana Cadangan	-	-	-	-
3	1	3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3	1	4 Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. 48.598.000.000,00	48.598.000.000,00	-	0,00
3	1	5 Penerimaan Kembali Pembonan Pinjaman	-	-	-	-
3	1	6 Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
		JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 133.966.650.000,00	131.690.787.756,63	(2.276.082.243,37)	(1,70)

NO URUT			URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN (RP)	SETRELAH PERUBAHAN (RP)	(RP)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	2		Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	0,00
3	2	2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	70.744.529.500,00	72.244.529.500,00	1.500.000.000	
			- Penyerahan Modal Kepada BUMD PDAM Lematang Enim	Rp. 69.744.529.500,00	69.744.529.500,00	-	0,00
			- Penyerahan Modal Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel	Rp. 1.000.000.000,00	2.500.000.000,00	1.500.000.000	150,00
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang				
			- Pembayaran Pokok Utang pada Asian Development Bank (ADB)	Rp. 181.135.587,42	181.135.587,42	-	0,00
3	2	4	Pembayaran Hutang pada pihak ketiga	979.964.000,00	999.964.000,00	20.000.000	
			- Pembayaran utang pada PT. Tanjung Lapan	Rp. 42.964.000,00	42.964.000,00	-	0,00
			- Pembayaran utang pada CV Excel 21	Rp. 40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00
			- Pembayaran utang pada PT. MDP	Rp. 897.000.000,00	897.000.000,00	-	0,00
			- Pembayaran utang pada PT. Nindra	Rp. -	20.000.000,00	20.000.000	
			JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. 71.905.629.087,42	73.425.629.087,42	1.520.000.000	2,11
			PEMBIAYAAN NETO	Rp. 62.061.220.912,58	58.265.138.669,21	(3.796.082.243,37)	(6,12)
3	3		Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	Rp. 0,00	0,00	0,00	

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

KABUPATEN MUARA ENIM
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2010

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA		PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah / Berkurang	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	Jumlah BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	Jumlah BELANJA		
2	Rp. 3	Rp. 4	Rp. 5	% 6	Rp. 7	Rp. 8	Rp. 9	Rp. 10	Rp. 11	Rp. 12	Rp. 13	% 14	
URUSAN WAJIB													
	831.213.043.182,84	895.358.483.882,03	64.065.440.699,19	8,87	483.638.755.593,42	483.354.765.942,03	831.011.541.835,42	487.481.718.367,21	897.710.513.161,03	895.251.061.628,21	95.246.518.962,19	9,22	
Pendidikan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	248.067.333.440,00	83.635.351.800,00	331.712.585.240,00	217.448.218.808,00	88.517.263.300,00	385.965.482.108,00	33.192.888.868,00	8,97	
Dinas Pendidikan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	248.067.333.440,00	83.635.351.800,00	331.712.585.240,00	217.448.218.808,00	88.517.263.300,00	385.965.482.108,00	33.192.888.868,00	8,97	
Kesehatan	16.158.672.831,00	15.785.223.195,18	(1.010.748.640,84)	(6,02)	54.378.622.892,00	81.151.894.897,00	111.530.888.889,00	53.347.291.866,00	83.822.538.391,00	117.292.794.469,00	5.758.921.821,00	12,83	
Dinas Kesehatan	16.158.672.831,00	15.785.223.195,18	(1.010.748.640,84)	(6,02)	54.378.622.892,00	81.151.894.897,00	111.530.888.889,00	53.347.291.866,00	83.822.538.391,00	117.292.794.469,00	5.758.921.821,00	12,83	
RSUD Dr. H.M. Rubani	15.680.790.200,00	12.136.102.195,15	(3.544.688.004,84)	(22,64)	12.136.779.841,00	20.927.977.037,00	33.064.757.678,00	13.629.671.104,00	21.354.528.300,00	34.632.266.040,00	1.615.542.306,00	4,86	
RSUD Taling Ud	261.532.000,00	161.832.000,00	-	-	3.263.888.243,00	7.233.916.500,00	9.796.193.743,00	2.587.332.100,00	7.673.100.500,00	9.610.491.000,00	2.143.388.966,00	2,28	
Pekerjaan Umum	1.136.889.888,00	137.154.908,00	(1.001.579.680,00)	(88,08)	5.168.188.648,00	187.643.411.962,00	292.343.251.954,00	6.227.847.823,18	197.635.826.426,00	203.863.784.362,18	(236.792.408,18)	(8,08)	
Dinas PU Bina Marga & Perumahan	48.107.109,00	48.107.109,00	-	-	2.454.661.483,00	130.088.130.900,00	132.540.791.483,00	2.454.661.483,00	130.088.130.900,00	132.541.393.673,18	420.932.210,18	6,32	
Dinas PU Opto Karya & Tata Ruang	1.104.982.500,00	88.407.500,00	(1.016.575.000,00)	(91,98)	2.713.527.165,00	67.555.281.062,00	70.268.808.227,00	3.773.186.340,00	67.555.281.062,00	72.947.390.950,00	124.130.159,00	0,15	
Perencanaan Pembangunan	-	-	-	-	2.168.178.288,00	8.852.843.956,00	11.021.022.244,00	2.218.588.196,30	8.854.872.456,00	11.891.541.546,00	1.105.821.438,00	11,18	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	2.168.178.288,00	8.852.843.956,00	11.021.022.244,00	2.218.588.196,30	8.854.872.456,00	11.891.541.546,00	1.105.821.438,00	11,18	
Perhubungan	694.858.000,00	1.061.001.000,00	366.143.000,00	49,83	2.135.885.201,00	2.464.984.800,00	4.600.869.999,00	2.135.473.677,30	2.623.554.800,00	2.606.628.977,30	665.488.476,00	16,88	
Dinas Perhubungan	694.858.000,00	1.061.001.000,00	366.143.000,00	49,83	2.135.885.201,00	2.464.984.800,00	4.600.869.999,00	2.135.473.677,30	2.623.554.800,00	2.606.628.977,30	665.488.476,00	16,88	
Lingkungan Hidup	111.000.000,00	111.000.000,00	-	-	1.420.333.126,00	2.252.434.872,00	3.672.768.000,00	1.420.167.187,30	2.252.434.872,00	3.145.632.159,00	12.864.081,30	1,88	
Badan Lingkungan Hidup	111.000.000,00	111.000.000,00	-	-	1.420.333.126,00	2.252.434.872,00	3.672.768.000,00	1.420.167.187,30	2.252.434.872,00	3.145.632.159,00	12.864.081,30	1,88	
Kependudukan & Catatan Sipil	152.500.000,00	152.500.000,00	-	-	1.776.932.896,00	2.424.182.500,00	4.201.115.396,00	1.787.632.583,00	2.387.158.758,00	4.634.882.330,00	432.267.131,30	19,11	
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	152.500.000,00	152.500.000,00	-	-	1.776.932.896,00	2.424.182.500,00	4.201.115.396,00	1.787.632.583,00	2.387.158.758,00	4.634.882.330,00	432.267.131,30	19,11	
Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera	-	-	-	-	5.351.917.240,00	3.419.314.251,00	8.771.231.491,00	5.295.112.195,00	3.554.658.252,00	8.856.832.646,00	80.560.554,00	8,93	
Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Perangai	-	-	-	-	5.351.917.240,00	3.419.314.251,00	8.771.231.491,00	5.295.112.195,00	3.554.658.252,00	8.856.832.646,00	80.560.554,00	8,93	
Sosial	-	-	-	-	1.218.528.788,00	5.459.951.188,00	6.678.479.976,00	1.244.290.962,00	4.959.434.900,00	5.903.725.262,00	(774.404.666,00)	(11,60)	
Dinas Sosial	-	-	-	-	1.218.528.788,00	5.459.951.188,00	6.678.479.976,00	1.244.290.962,00	4.959.434.900,00	5.903.725.262,00	(774.404.666,00)	(11,60)	
Ketenagakerjaan	-	-	-	-	1.088.918.181,00	1.148.336.000,00	2.237.254.181,00	1.013.182.921,00	1.148.336.000,00	2.656.516.921,00	(75.736.260,00)	(3,41)	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	1.088.918.181,00	1.148.336.000,00	2.237.254.181,00	1.013.182.921,00	1.148.336.000,00	2.656.516.921,00	(75.736.260,00)	(3,41)	
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	1.228.888.188,00	1.228.118.110,00	2.456.996.298,00	1.228.118.110,00	1.228.118.110,00	2.562.597.143,00	113.429.767,00	4,83	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	1.228.888.188,00	1.228.118.110,00	2.456.996.298,00	1.228.118.110,00	1.228.118.110,00	2.562.597.143,00	113.429.767,00	4,83	
Perencanaan Modal	-	-	-	-	536.858.127,00	1.617.184.500,00	2.154.042.627,00	464.118.789,00	818.788.593,00	1.282.883.204,00	(255.725.958,00)	(18,91)	
Kantor Perencanaan Modal	-	-	-	-	536.858.127,00	1.617.184.500,00	2.154.042.627,00	464.118.789,00	818.788.593,00	1.282.883.204,00	(255.725.958,00)	(18,91)	

URAIAN PEMERINTAH DAN KAWASAH	PENDAPATAN				BELANJA								
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PERTAMBAHAN / BERTURUNKAN		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bedahbah / Berturunkan		
					TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA			
					Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Keperawatan dan Gizi	401.000.000,00	467.689.000,00	2.000.000,00	0,49	1.387.891.877,00	2.648.273.100,00	4.036.169.977,00	1.800.216.140,00	2.945.274.100,00	4.365.530.240,00	271.580.269,00	6,73	
Keperawatan Keluarga, Komunitas dan Promosi	401.000.000,00	467.689.000,00	2.000.000,00	0,49	1.387.891.877,00	2.648.273.100,00	4.036.169.977,00	1.800.216.140,00	2.945.274.100,00	4.365.530.240,00	271.580.269,00	6,73	
Keperawatan Bedah & Patok Bedah Regent	-	-	-	-	3.214.275.200,00	4.135.783.800,00	8.610.376.000,00	3.325.961.460,00	4.368.167.800,00	8.465.159.300,00	460.680.200,00	5,35	
Keperawatan Patok & Patokregent	-	-	-	-	1.317.548.813,00	2.444.079.300,00	2.761.587.060,00	1.219.126.350,00	2.444.079.300,00	3.763.165.700,00	1.517.140,00	0,04	
Keperawatan Patok Perawat	-	-	-	-	1.956.626.589,00	2.251.684.500,00	4.240.431.060,00	2.296.835.000,00	2.402.158.500,00	4.996.583.500,00	451.102.500,00	13,62	
Keperawatan Patok, Perawatan Patok, Patok, Patok	511.301.027.772,84	917.624.643.114,84	65.123.817.340,00	12,71	125.166.122.912,42	96.469.379.711,00	318.611.334.623,42	134.442.495.843,00	151.306.088.163,00	235.447.576.946,00	16.815.645.323,57	5,21	
Keperawatan Patok, Patok, Patok, Patok	-	-	-	-	8.822.472.600,00	-	8.822.472.600,00	8.822.472.600,00	-	8.822.472.600,00	-	-	
Keperawatan Patok, Patok, Patok, Patok	-	-	-	-	829.351.110,00	-	829.351.110,00	829.351.110,00	-	829.351.110,00	-	-	
Keperawatan Patok	-	-	-	-	8.896.345.917,00	49.546.318.130,00	58.208.663.477,00	8.139.542.012,00	62.381.476.340,00	71.421.026.252,00	13.214.366.735,00	22,71	
Keperawatan Patok	-	-	-	-	2.321.902.062,00	19.156.243.000,00	21.166.189.000,00	1.781.505.041,00	18.551.000.000,00	20.336.605.041,00	(841.502.421,00)	(4,00)	
Keperawatan Patok	-	-	-	-	1.677.951.575,00	2.185.154.500,00	2.037.208.520,00	1.715.193.061,00	2.174.445.960,00	3.889.625.011,00	92.471.381,00	1,62	
Keperawatan Patok, Patok, Patok, Patok, Patok	511.754.177.772,84	975.312.270.114,84	63.558.092.340	8,57	72.743.883.680,44	9.790.912.000,00	90.512.758.330,44	16.218.282.276,00	13.251.326.100,00	89.405.614.428,00	1.906.806.088,00	2,28	
Keperawatan Patok	126.850.000,00	126.850.000,00	2.000.000,00	1,60	1.831.026.026,00	9.119.369.850,00	11.051.012.876,00	2.637.746.371,00	8.870.150.000,00	11.851.365.671,00	596.302.795,00	5,35	
Keperawatan Patok, Patok, Patok, Patok	12.000.000,00	2.105.325.000,00	2.163.625.000,00	18,84	293.202.715,00	1.805.873.280,00	1.306.078.065,00	435.577.304,00	1.111.305.206,00	1.545.312.870,00	347.804.871,00	16,57	
Keperawatan Patok, Patok, Patok, Patok	-	-	-	-	889.795.205,00	299.773.500,00	354.038.783,00	630.712.405,00	265.773.500,00	797.475.905,00	(157.482.798,00)	(16,48)	
Keperawatan Patok, Patok, Patok, Patok	-	-	-	-	451.880.914,00	347.247.000,00	998.307.874,00	568.784.310,00	347.247.000,00	614.531.310,00	155.729.400,00	16,57	
Keperawatan Patok, Patok, Patok, Patok	-	-	-	-	844.883.602,00	333.136.500,00	306.006.162,00	660.287.872,00	333.136.500,00	633.424.472,00	(84.575.600,00)	(16,47)	
Keperawatan Patok, Patok, Patok	-	-	-	-	1.279.234.586,00	322.632.254,00	1.502.166.839,00	1.024.272.304,00	322.632.250,00	1.547.204.514,00	(54.962.224,00)	(3,63)	
Keperawatan Patok, Patok, Patok	-	-	-	-	2.277.176.407,00	495.898.000,00	2.773.034.607,00	2.156.454.070,00	495.898.000,00	2.686.312.357,00	(68.721.950,00)	(2,42)	
Keperawatan Patok, Patok	-	-	-	-	3.948.571.458,00	112.725.750,00	4.051.297.208,00	3.302.245.430,00	112.747.750,00	4.057.983.108,00	(23.314.020,00)	(0,57)	
Keperawatan Patok, Patok	-	-	-	-	948.384.058,00	258.594.750,00	1.195.972.008,00	919.677.634,00	258.598.750,00	1.226.185.384,00	133.313.576,00	12,06	
Keperawatan Patok, Patok	-	-	-	-	352.661.804,00	273.067.175,00	625.607.079,00	654.111.585,00	273.067.075,00	626.119.591,00	102.489.782,00	12,53	
Keperawatan Patok, Patok, Patok	-	-	-	-	1.035.745.636,00	266.371.750,00	1.370.117.386,00	1.174.478.451,00	266.371.750,00	1.464.848.211,00	54.730.825,00	4,01	
Keperawatan Patok, Patok, Patok	-	-	-	-	1.274.150.470,00	418.404.750,00	1.691.155.220,00	1.331.618.119,00	418.404.750,00	1.754.029.505,00	62.663.683,00	3,72	
Keperawatan Patok, Patok	-	-	-	-	201.675.125,00	216.313.250,00	637.878.315,00	591.574.023,00	216.313.250,00	607.777.773,00	(10.360.662,00)	(1,60)	
Keperawatan Patok, Patok, Patok	-	-	-	-	468.164.985,00	206.719.250,00	637.375.235,00	474.314.127,00	206.719.250,00	687.784.777,00	(13.983.458,00)	(2,19)	
Keperawatan Patok, Patok, Patok	-	-	-	-	366.802.655,00	236.263.600,00	638.130.595,00	548.842.589,00	236.263.600,00	701.127.455,00	(56.975.138,00)	(8,93)	
Keperawatan Patok, Patok, Patok	-	-	-	-	480.536.968,00	217.564.500,00	688.121.400,00	550.552.004,00	217.564.500,00	772.277.140,00	70.158.668,00	10,22	
Keperawatan Patok, Patok, Patok, Patok	-	-	-	-	1.263.275.413,00	306.418.450,00	1.563.693.863,00	1.195.818.247,00	306.418.450,00	1.498.236.697,00	(78.457.166,00)	(5,02)	
Keperawatan Patok	-	-	-	-	1.304.531.800,00	310.544.000,00	1.323.081.820,00	535.526.000,00	310.544.000,00	1.254.110.000,00	(58.911.820,00)	(4,41)	
Keperawatan Patok	-	-	-	-	601.530.064,00	239.403.000,00	838.685.904,00	630.154.254,00	239.403.000,00	869.615.254,00	6.625.350,00	0,79	
Keperawatan Patok	-	-	-	-	514.472.510,00	230.763.600,00	1.145.275.160,00	591.295.325,00	242.762.000,00	1.214.157.325,00	86.302.915,00	7,53	
Keperawatan Patok	-	-	-	-	379.365.552,00	249.142.250,00	628.107.802,00	587.394.470,00	249.142.250,00	816.446.120,00	180.336.318,00	29,35	
Keperawatan Patok, Patok	-	-	-	-	1.143.721.560,00	265.195.750,00	1.408.917.310,00	1.243.415.010,00	265.195.750,00	1.523.310.760,00	114.399.440,00	8,12	
Keperawatan Patok, Patok, Patok	-	-	-	-	670.615.004,00	267.837.750,00	1.136.503.744,00	647.320.124,00	267.837.750,00	1.115.290.074,00	(23.252.970,00)	(2,04)	
Keperawatan Patok, Patok	-	-	-	-	380.534.825,00	317.812.750,00	878.367.575,00	463.921.000,00	317.812.750,00	777.485.750,00	33.750.190,00	3,83	
Keperawatan Patok	-	-	-	-	477.372.426,00	1.448.151.400,00	1.823.523.826,00	519.729.877,00	1.448.151.400,00	1.859.877.277,00	33.348.440,00	1,73	
Keperawatan Patok, Patok	-	-	-	-	477.372.426,00	1.448.151.400,00	1.823.523.826,00	519.729.877,00	1.448.151.400,00	1.859.877.277,00	33.348.440,00	1,73	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN	PENDAPATAN				JELUR BELA								
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PERTAMBAHAN (DEKURBANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			PERTAMBAHAN (SEKURANG)		
					DETAILED PERUBAHAN								
					TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	Jumlah BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	Jumlah BELANJA			
P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	P ₈	P ₉	P ₁₀	P ₁₁	P ₁₂	P ₁₃	P ₁₄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bantuan Operasional Masyarakat Desa	-	-	-	-	1.468.834.881,00	1.153.677.515,00	4.651.812.396,00	1.467.648.150,00	2.881.307.515,00	4.388.955.665,00	(233.856.591,00)	(1,00)	
Bantuan Operasional Masyarakat Desa (Jumlah)	-	-	-	-	1.468.834.881,00	1.153.677.515,00	4.651.812.396,00	1.467.648.150,00	2.881.307.515,00	4.388.955.665,00	(233.856.591,00)	(1,00)	
Bantuan Operasional Masyarakat Desa (Jumlah)	-	-	-	-	515.654.421,00	2.818.118.090,00	1.653.342.471,00	541.389.351,00	3.885.491.500,00	4.546.880.851,00	893.532.432,00	24,36	
Bantuan Operasional Masyarakat Desa (Jumlah)	-	-	-	-	415.624.421,00	2.818.118.090,00	1.653.342.471,00	401.513.152,00	3.885.491.500,00	4.546.880.851,00	893.532.432,00	24,36	
Bantuan Operasional Masyarakat Desa (Jumlah)	-	-	-	-	581.213.152,00	1.566.159.000,00	1.269.823.813,00	169.827.287,00	1.685.959.500,00	2.331.481.813,00	77.486.250,00	2,43	
Bantuan Operasional Masyarakat Desa (Jumlah)	-	-	-	-	581.213.152,00	1.566.159.000,00	1.269.823.813,00	169.827.287,00	1.685.959.500,00	2.331.481.813,00	77.486.250,00	2,43	
Jumlah PERUBAHAN	1.327.830.300,00	1.264.105.600,00	6.725.000,00	0,55	22.637.787.400,00	28.433.163.375,00	57.468.548.596,00	23.337.708.648,00	18.998.514.375,00	58.836.244.623,00	4.575.498.405,00	3,43	
Pendapatan	271.800.000,00	271.315.000,00	475.000,00	0,17	18.894.146.447,00	28.389.314.630,00	41.083.623.491,00	11.861.449.780,00	34.659.215.250,00	42.388.814.135,00	1.113.268.638,00	12,38	
Desa (Jumlah)	-	-	-	-	2.080.967.402,00	5.340.634.500,00	7.421.637.912,00	2.546.244.817,00	6.256.225.000,00	7.841.434.217,00	613.858.315,00	8,98	
Desa (Jumlah)	127.500.000,00	129.915.000,00	2.415.000,00	0,34	3.320.293.505,00	5.726.264.000,00	6.045.563.826,00	3.363.871.853,00	5.171.154.400,00	5.484.788.250,00	2.612.442,00	0,55	
Desa (Jumlah)	137.400.000,00	137.400.000,00	-	-	1.754.000.000,00	1.330.000.000,00	1.157.119.888,00	2.344.863.133,00	1.467.625.000,00	1.616.179.100,00	261.453.207,00	1,97	
Desa (Jumlah)	-	-	-	-	3.320.293.505,00	5.330.444.000,00	16.483.204.431,00	4.294.513.067,00	6.000.583.800,00	10.005.188.851,00	3.985.819.436,00	27,26	
Desa (Jumlah)	-	-	-	-	2.190.923.128,00	1.836.947.000,00	1.238.875.026,00	2.440.817.434,00	1.974.145.000,00	3.480.163.250,00	241.281.617,00	1,40	
Desa (Jumlah)	-	-	-	-	2.190.923.128,00	1.836.947.000,00	1.238.875.026,00	2.440.817.434,00	1.974.145.000,00	3.480.163.250,00	241.281.617,00	1,40	
Desa (Jumlah)	13.000.000,00	13.400.000,00	4.000.000,00	48,33	1.227.944.911,00	8.539.759.125,00	1.037.783.576,00	1.314.108.104,00	8.306.124.425,00	10.104.479.999,00	214.164.333,00	2,30	
Desa (Jumlah)	13.000.000,00	13.400.000,00	4.000.000,00	48,33	1.227.944.911,00	8.539.759.125,00	1.037.783.576,00	1.314.108.104,00	8.306.124.425,00	10.104.479.999,00	214.164.333,00	2,30	
Desa (Jumlah)	567.830.300,00	567.830.300,00	-	-	9.815.773.218,00	1.886.880.600,00	1.510.453.856,00	2.025.218.148,00	1.718.440.600,00	2.794.325.149,00	284.319.181,00	8,43	
Desa (Jumlah)	567.830.300,00	567.830.300,00	-	-	1.515.773.250,00	1.886.880.600,00	1.510.453.856,00	2.025.218.148,00	1.718.440.600,00	2.794.325.149,00	284.319.181,00	8,43	
Jumlah	832.916.872.482,36	836.825.138.882,00	3.908.266.399,64	0,47	415.486.843.976,47	518.877.940.017,00	693.973.081.693,42	318.819.446.041,21	544.988.837.518,60	1.054.893.317.081,21	83.216.236.475,79	9,83	
Jumlah (Jumlah)							(62.001.220.912,53)			(38.255.138.609,21)			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN	PENDAPATAN						Jumlah
	PENDAPATAN		PENDAPATAN		PENDAPATAN		
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	1	2	3	4	5	6	
Desa (Jumlah)							
Desa (Jumlah)	132.898.816,00	131.683.787,756,43	71.835.829.307,43	71.425.639.687,43	81.061.324.811,56	58.285.138.568,31	0,00

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR